

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Merauke mempunyai tugas dan fungsi dalam menyajikan Laporan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Merauke berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Merauke. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Merauke adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

- b. Aset Tetap**
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset LAINLAIN pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

- jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset LAINLAIN berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajibanban Jangka Pendek**
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang**
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.787.374.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Merauke yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Perpajakan	0	0
Pendapatan PNPB	0	52.000.000
Pendapatan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan	0	52.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	2.789.670.000	2.095.113.000
Belanja Barang	2.997.704.000	2.604.084.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	5.787.374.000	4.699.197.000

Realisasi
Pendapatan
Rp1.988.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.988.000 atau mencapai (96,18) persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp52.000.000. Pendapatan Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN dan Pendapatan LAINLAIN dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	52.000.000	1.988.000	3,82

Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	52.000.000	1.988.000	(96,18)

Realisasi Pendapatan bersumber dari Pemeriksaan Laboratorium dan Lelang TA 2024

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.988.000	2.465.000	(19,35)
Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah	1.988.000	2.465.000	(19,35)

B.2 Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Perpajakan	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

B.3 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.988.000 dan Rp2.465.000.

Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	753.000	0	0,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.235.000	2.285.000	(45,95)
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	0	180.000	(100,00)

Jumlah Pendapatan Kotor	1.988.000	2.465.000	(19,35)
Pengembalian Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	1.988.000	2.465.000	(19,35)

Pendapatan Hibah Rp0

B.4 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Pendapatan Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Pendapatan Hibah	0	0	0,00
Jumlah Pendapatan	0	0	0,00

Realisasi Belanja Rp4.665.498.619

B.5 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Akuntansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp4.665.498.619 atau 91,81% dari anggaran belanja sebesar Rp4.699.197.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.095.113.000	2.090.722.630	99,79
Belanja Barang	2.604.084.000	2.574.776.305	98,87
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	4.699.197.000	4.665.498.935	99,28
Pengembalian Belanja Pegawai	-	316	-
Pengembalian Belanja Barang	-	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	0	-
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	-	0	-
Jumlah	4.699.197.000	4.665.498.619	99,28

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 17,10 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi2023	%
Belanja Pegawai	2.090.722.314	2.468.305.734	(15,30)
Belanja Barang	2.574.776.305	3.035.802.521	(15,19)
Belanja Modal	0	123.600.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	4.665.498.619	5.627.708.255	(17,10)

B.6 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp2.090.722.314

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.090.722.314 dan Rp2.468.305.734. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 15,30 persen dari TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	934.424.997	1.186.629.548	(21,25)
Belanja Lembur	108.150.450	72.852.000	48,45
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	956.477.609	1.106.954.784	(13,59)
Jumlah Belanja Kotor	2.090.722.630	2.366.436.332	(11,65)
Pengembalian Belanja Pegawai	(316)	(2.713.138)	(99,99)
Jumlah Belanja	2.090.722.314	2.468.305.734	(15,30)

B.7 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp2.574.776.305

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.574.776.305 dan Rp3.035.802.521. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 15,19% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Barang Operasional	732.767.826	847.920.538	(13,58)
Belanja Barang Non Operasional	254.030.750	290.582.022	(12,58)
Belanja Persediaan	90.862.100	187.454.501	(51,53)
Belanja Jasa	313.589.873	239.181.184	31,11
Belanja Pemeliharaan	639.685.464	616.364.714	3,78
Belanja Perjalanan Dinas	543.840.292	858.244.912	(36,63)
Jumlah Belanja Kotor	2.574.776.305	3.039.747.871	(15,30)
Pengembalian Belanja Barang	0	(3.945.350)	(100,00)
Jumlah Belanja	2.574.776.305	3.035.802.521	(15,19)

Belanja Modal
Rp0

B.8 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp123.600.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	123.600.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	123.600.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	123.600.000	(100,00)

Belanja Modal Tanah Rp0

B.8.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023. .

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.8.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp123.600.000.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	123.600.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	123.600.000	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	123.600.000	(100,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.8.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.8.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.8.5 Belanja Modal Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	0	0	0,00

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.9 Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00

Aset Lancar
Rp27.713.088

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp27.713.088 dan Rp32.990.258.
Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	0	0
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	0	0
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	0	0
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Perpajakan
Rp0

C.1.4. Piutang Perpajakan
Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Piutang Perpajakan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.5. Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0	C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0	C.1.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek Rp0	C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0,
Beban Dibayar di Muka Rp0	C.1.9. Beban Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0	C.1.10. Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Persediaan Rp27.713.088	C.1.10. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp27.713.088 dan Rp32.990.258 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Barang Konsumsi	24.377.088	29.061.978
Amunisi	0	0
Barang untuk Pemeliharaan	2.991.000	2.089.000
Suku Cadang	0	1.188.800
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
Jumlah	27.713.088	32.990.258

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp5.977.836.890

C.2. Aset Tetap
Saldo Aset Tetap Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.977.836.890 dan Rp8.833.737.341.
Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp2.225.170.000

C.2.1. Tanah
Tanah yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.225.170.000 dan Rp2.253.778.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	2.253.778.000
Pembelian	0
Revaluasi Aset	(125.000.000)
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	2.225.170.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2.225.170.000

Peralatan dan Mesin
Rp4.160.935.175

C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.160.935.175 dan Rp6.671.154.250. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	6.671.154.250
Pembelian	980000000
Hibah	98.000.000
Transfer Masuk	137.000.000
Koreksi Tambah	27.785.000
Penghentian aset dari penggunaan	(10.000.000)
Saldo Per 31 Desember 2024	4.160.935.175
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.744.886.019)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	416.049.156

Gedung dan Bangunan
Rp3.849.662.100

C.2.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.849.662.100 dan Rp6.130.800.295.
Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	6.130.800.295
Pembangunan Gedung	0
Mutasi Kurang:	-
Saldo Per 31 Desember 2024	3.849.662.100
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(632.920.010)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	3.216.742.090

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp455.493.325

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp455.493.325 dan Rp1.220.831.690 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	1.220.831.690
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2024	455.493.325
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	455.493.325

Mutasi tambah:
Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp31.286.760

C.2.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.286.760 dan Rp31.286.760 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	31.286.760
-	-
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	31.286.760
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	31.286.760

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp4.744.710.470

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.744.710.470 dan Rp7.474.113.654. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	4.160.935.175	(3.744.886.019)	416.049.156
2.	Gedung dan Bangunan	3.849.662.100	(632.920.010)	3.216.742.090
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	455.493.325	0	455.493.325
4.	Aset Tetap Lainnya	31.286.760	0	31.286.760

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,

Piutang Jangka
Panjang Lainnya Rp0

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya
Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0
--	---	--	---

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset LAINLAIN.

Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Rp0

C.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Nilai perolehan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.2. Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke berupa *software* yang digunakan

	untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud
<i>Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp0</i>	C.4.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.
<i>Aset Lain-Lain Rp0</i>	C.4.4. Aset Lain-Lain Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Rincian Aset LAINLAIN berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0</i>	C.4.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
<i>Kewajiban Jangka Pendek Rp 8.530.782</i>	C.5. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.530.782 dan Rp12.256.369.
<i>Uang Muka dari KPPN Rp0</i>	C.5.1. Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
<i>Utang kepada Pihak Ketiga Rp0</i>	C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Pendapatan Diterima di Muka Rp0</i>	C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Beban yang Masih Harus Dibayar Rp8.530.782</i>	C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.530.782 dan Rp12.256.369, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	2024	2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	8.530.782	12.256.369
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Bantuan Sosial yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	8.530.782	12.256.369

Utang yang Belum Ditagihkan Rp0

C.5.5. Utang yang Belum Ditagihkan
Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Jangka Panjang Rp 0

C.6. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Panjang Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.6.1. Kewajiban Konsesi Jasa
Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0,

Ekuitas Rp5.997.019.196

C.7. Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.997.019.196 dan Rp8.854.471.230. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
Perpajakan
Rp0

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Perpajakan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

Pendapatan
PNBP
Rp1.235.000

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.235.000 dan Rp2.465.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.235.000	2.285.000	(45,95)
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	0	180.000	(100,00)
Jumlah	1.235.000	2.465.000	(49,90)

Pendapatan
Hibah
Rp0

D.3 Pendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Hibah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Pegawai
Rp2.090.722.314

D.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.090.722.314 dan Rp2.468.305.734. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	934.424.681	1.185.454.360	(21,18)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	91.669.574	104.582.540	(12,35)
Beban Lembur	108.150.450	71.719.600	50,80
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	956.477.609	1.106.549.234	(13,56)
Jumlah Beban	2.090.722.314	2.468.305.734	(15,30)

Beban
Persediaan
Rp88.754.570

D.5 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp88.754.570 dan Rp234.240.331. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	68.150.290	204.081.671	(66,61)
Beban Persediaan Suku Cadang	1.188.800	18.357.100	(93,52)
Beban Persediaan Bahan Baku	19.415.480	11.801.560	64,52
Jumlah Beban	88.754.570	234.240.331	(62,11)

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.304.952.8
62

D.6 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.304.952.862 dan Rp1.389.282.267.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	556.018.904	598.251.462	(7,06)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	69.300.000	75.600.000	(8,33)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.200.000	3.736.600	(14,36)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.432.000	108.956.000	(59,22)
Beban Barang Operasional Lainnya	58.497.572	60.020.767	(2,54)
Beban Bahan	244.989.750	262.622.022	(6,71)
Beban Honor Output Kegiatan	4.896.000	8.160.000	(40,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	18.000.000	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.145.000	4.896.000	(15,34)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	4.145.000	4.896.000	(15,34)
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	4.145.000	4.896.000	(15,34)
Beban Langganan Listrik	113.674.140	114.630.663	(0,83)
Beban Langganan Telepon	875.946	1.065.753	(17,81)
Beban Langganan Air	1.732.050	4.025.400	(56,97)
Beban Sewa	56.801.500	15.250.000	272,47
Beban Jasa Profesi	7.000.000	15.000.000	(53,33)
Beban Jasa Lainnya	131.100.000	89.275.600	46,85
Jumlah Beban	1.304.952.862	1.389.282.267	(6,07)

Beban
Pemeliharaan
Rp647.437.664

D.7 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp647.437.664 dan Rp631.428.624. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	348.857.530	362.976.650	(3,89)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	290.827.934	251.078.214	15,83
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.752.200	17.373.760	(55,38)
Jumlah Beban	647.437.664	631.428.624	2,54

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp543.840.292

D.8 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp543.840.292 dan Rp857.239.412. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	395.115.292	88.731.127	345,30
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	94.040.000	195.310.000	(51,85)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	20.150.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.685.000	553.048.285	(90,11)
Jumlah Beban	543.840.292	857.239.412	(36,56)

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.9 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan

akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.10 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp412.072.458

D.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp412.072.458 dan Rp586.128.122. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.191.308	341.450.713	(19,70)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.387.817	134.427.415	(17,14)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.752.569	87.632.804	(85,45)
Beban Penyusutan Irigasi	8.820.539	14.360.757	(38,58)

Beban Penyusutan Jaringan	4.920.225	8.256.433	(40,41)
Jumlah Penyusutan	412.072.458	586.128.122	(29,70)
Jumlah Amortisasi	0	0	0,00
Jumlah Beban	412.072.458	586.128.122	(29,70)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.12 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Jumlah Beban	0	0	0,00

Kegiatan Non
Operasional
Rp2.745.000

D.13 Kegiatan Non Operasional
Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:
Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	753.000	0	0,00
Beban Pelepasan Aset	3.498.000	0	0,00
Jumlah Beban	(2.745.000)	0	0,00

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp8.854.471.230</i> <i>0</i>	E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.854.471.230 dan Rp9.380.499.465.
<i>Defisit LO</i> <i>Rp5.081.000.160</i> <i>0</i>	E.2. Surplus/Defisit-LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah defisit sebesar Rp5.081.000.160 dan Rp6.151.271.490. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi</i> <i>Rp0</i> <i>Penyesuaian Nilai Aset Rp0</i>	E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.
	E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</i>	E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
<i>Selisih Revaluasi Aset</i> <i>Rp0</i>	E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0</i>	E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi
LAINLAIN Rp0

E.4.5. Koreksi LAINLAIN

Koreksi LAINLAIN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.223.548.126

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.223.548.126 dan Rp5.625.243.255.
Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(1.988.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.665.498.619
Transfer Masuk	85.117.500
Transfer Keluar	(2.525.079.993)
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	2.223.548.126

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).
Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp1.988.000 sedangkan DKEL sebesar Rp4.665.498.619.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp85.117.500 terdiri dari:
Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.525.079.993 dengan rincian sebagai berikut.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024 dan total Rp0 yang merupakan Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari Tahun Anggaran Yang Lalu.
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp5.997.019.196

E.6. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.997.019.196 dan Rp8.854.471.230.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Sampai dengan 30 September 2024 tidak terdapat temuan BPK yang belum ditindaklanjuti atas pemeriksaan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Merauke.

F.2 Kewajiban Jangka Pendek

Pada Neraca terdapat Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Kepada Pihak Ketiga dengan rincian diantaranya Langganan Daya Jasa berupa Listrik Telepon dan Air Bulan Desember Tahun .